



## Peran Komunikasi Organisasi Islam dalam Penguatan Kebijakan Kesejahteraan Islami di Sumatera Utara

### *The Role of Islamic Organizational Communication in Strengthening Islamic Welfare Policies in North Sumatra*

Juliadi Zurdani Harahap\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Syukur Kholil, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

#### ABSTRACT

This study explores the role of Islamic organizations in shaping welfare policies through inter-organizational communication in North Sumatra. It focuses on how organizations such as Al Washliyah, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama interact with local government agencies to construct value-based welfare initiatives. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis to examine the communication structures and strategic roles of these organizations. The findings reveal that while organizational communication has adapted to various formal and informal channels, fragmentation still exists due to limited coordination frameworks and political segmentation. Nevertheless, Islamic values such as justice (*al-'adl*), public benefit (*maslahah*), and trust (*amanah*) have enhanced communication legitimacy and community engagement. The study concludes that integrating ethical communication systems into policy frameworks can promote inclusive and sustainable welfare governance in Muslim-majority regions.

#### ARTICLE HISTORY

Received 13/05/2025  
Revised 04/06/2025  
Accepted 18/06/2025  
Published 20/06/2025

#### KEYWORDS

Islamic organization; communication system; welfare policy; religious values; Islamic Based Governance.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [juliadi4004243016@uisu.ac.id](mailto:juliadi4004243016@uisu.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11181>

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan fundamental dari penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan ditegaskan dalam berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah. Namun, capaian kesejahteraan yang merata di Indonesia masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah seperti Sumatera Utara yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) berada di bawah rata-rata nasional dan disparitas kesejahteraan yang cukup tinggi antar kabupaten/kota (Afandi, 2021). Dalam konteks tersebut, keberadaan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi Islam, menjadi salah satu aktor penting dalam mendukung upaya negara membangun kesejahteraan berbasis nilai dan keadilan sosial.

Organisasi Islam seperti Al Jam'iyatul Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran historis dan struktural dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Selain bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, ketiga organisasi ini telah lama terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan zakat, advokasi sosial, dan layanan kesehatan masyarakat bawah (Mu'alimin et al., 2024). Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pelengkap kerja pemerintah, melainkan sebagai entitas keagamaan dengan kekuatan sosial dan jaringan struktural yang mampu memobilisasi sumber daya umat secara sistemik.

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan, komunikasi antar organisasi Islam dengan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sinergi kebijakan. Namun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana komunikasi organisasi Islam terstruktur, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk penguatan kebijakan sosial berbasis nilai keislaman. Sebagian besar kajian masih berfokus pada output kegiatan sosial-keagamaan tanpa menelaah dinamika komunikasinya secara sistemik (Nashrillah, 2016; Nugroho et al., 2024).

Teori sistem yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan dikontekstualkan dalam teori komunikasi organisasi menegaskan pentingnya keterhubungan antar sub-sistem dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam hal ini, organisasi Islam dapat dilihat sebagai sub-sistem sosial yang berinteraksi dengan sistem kebijakan pemerintah. Ketika hubungan komunikasi berjalan efektif, maka terjadi proses pertukaran informasi, legitimasi sosial, dan koordinasi tindakan yang dapat memperkuat daya dorong terhadap kebijakan kesejahteraan yang inklusif dan berakar pada nilai lokal (Yani et al., [2022](#)).

Dalam pendekatan sistem terbuka, komunikasi bukan hanya saluran informasi, melainkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi adaptif terhadap lingkungannya. Dengan menerapkan prinsip ini, organisasi Islam di Sumut dapat diposisikan sebagai simpul-simpul komunikasi antara negara dan masyarakat, khususnya dalam isu-isu kesejahteraan umat seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kesehatan berbasis komunitas (Kholid et al., [2019](#)).

Namun dalam realitas kebijakan di Sumatera Utara, hubungan komunikasi lintas organisasi Islam dan pemerintah daerah masih mengalami berbagai kendala seperti segmentasi kepentingan, kurangnya forum komunikasi berkelanjutan, dan minimnya integrasi program sosial-keagamaan dalam RPJMD daerah. Hal ini diperkuat oleh temuan (Saleh, [2024](#); Zulvianti et al., [2021](#)) yang menunjukkan bahwa kolaborasi formal antara ormas Islam dan pemda masih sporadis dan lebih bersifat seremonial ketimbang substantif.

Di sisi lain, potensi organisasi Islam dalam penguatan basis data sosial keumatan, distribusi zakat, pengentasan stunting berbasis masjid, dan ekonomi halal belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam desain sistem kesejahteraan daerah. Padahal, penelitian oleh Putri et al. ([2023](#)) membuktikan bahwa peran komunikasi struktural antar organisasi Islam dan birokrasi mampu memperluas jangkauan program pemerintah hingga ke level paling bawah masyarakat. Ketiadaan mekanisme komunikasi sistemik menyebabkan potensi sinergi ini tidak berkembang secara optimal.

Kebaruan penelitian ini adalah penempatan komunikasi organisasi Islam dalam kerangka teori sistem sebagai penghubung kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan lokal. Penelitian terdahulu banyak membahas efektivitas program keagamaan atau aktivitas ormas secara mikro, namun belum mengulas bagaimana struktur komunikasi organisasi Islam itu sendiri berfungsi sebagai sub-sistem dalam sistem kesejahteraan masyarakat daerah (Yadi, [2020](#)).

Artikel ini mengkaji bagaimana struktur komunikasi antar organisasi Islam besar (Al Washliyah, Muhammadiyah, NU) di Sumatera Utara membentuk sinergi kebijakan kesejahteraan umat? Apa saja tantangan dan peluang komunikasi yang muncul dalam interaksi antara ormas Islam dan pemerintah daerah? Serta bagaimana nilai-nilai Islam dikonstruksi dalam proses komunikasi kebijakan tersebut? Melalui pendekatan ini, tulisan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dalam mengembangkan studi komunikasi organisasi berbasis nilai keislaman dan kontribusi praktis dalam merancang desain kebijakan yang partisipatif serta lebih terintegrasi antara negara dan masyarakat sipil religius.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk memahami secara mendalam bagaimana komunikasi lintas sub-sistem organisasi Islam di Sumatera Utara membentuk sinergi dalam kebijakan kesejahteraan berbasis nilai keislaman. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menggali kompleksitas komunikasi organisasi yang tidak dapat diukur hanya melalui data kuantitatif (Creswell, [2015](#)). Fokus utama penelitian ini adalah

mengungkap dinamika komunikasi antar aktor, struktur hubungan antar organisasi, serta makna simbolik yang dibangun dalam interaksi mereka dengan sistem kebijakan daerah.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan 12 informan yang terdiri dari pengurus wilayah Al Jam'iyatul Washliyah, Muhammadiyah, dan NU Sumatera Utara, pejabat dari Dinas Sosial dan Bappeda Provinsi, serta tokoh masyarakat keagamaan yang terlibat dalam forum komunikasi umat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas narasi informan, dan direkam serta ditranskripsi untuk dianalisis secara tematik (Rachman et al., 2024). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terbatas pada kegiatan kolaboratif seperti seminar, forum zakat, dan program sosial lintas ormas.

Sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen seperti notulensi forum lintas ormas, berita media daring, laporan program sosial dari masing-masing organisasi Islam, serta regulasi daerah yang terkait dengan kesejahteraan umat. Data ini digunakan untuk memperkuat interpretasi dan triangulasi terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti juga mengkaji dokumen internal seperti AD/ART dan peta jaringan organisasi Islam untuk memahami struktur komunikasi internal dan eksternal masing-masing organisasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dengan menggunakan metode koding terbuka dan *axial coding* (Mackiewicz, 2018). Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari identifikasi tema awal, pengelompokan data berdasarkan pola komunikasi, hingga interpretasi relasi antar sub-sistem organisasi. Validitas data diperkuat melalui teknik *member checking* dengan mengembalikan hasil temuan sementara kepada informan kunci untuk dikonfirmasi ulang, serta *peer debriefing* dengan dua orang pakar komunikasi organisasi dari universitas lokal.

Pemilihan lokasi penelitian di Sumatera Utara dilakukan secara purposif berdasarkan dua pertimbangan utama: (1) wilayah ini merupakan basis historis organisasi Islam besar seperti Al Washliyah, NU, dan Muhammadiyah; dan (2) terdapat dinamika interaksi antara organisasi keagamaan dan pemerintah dalam program kesejahteraan seperti pengentasan stunting, distribusi zakat, dan pendidikan berbasis pesantren. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam memahami bagaimana sistem komunikasi organisasi Islam dapat diperkuat untuk mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berbasis nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur dan Dinamika Komunikasi Organisasi Islam di Sumatera Utara

Struktur komunikasi dalam organisasi Islam di Sumatera Utara seperti Al Jam'iyatul Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan pola hierarkis yang kuat namun tetap terbuka terhadap mekanisme informal. Ketiga organisasi ini memiliki struktur resmi dari tingkat wilayah hingga ranting dengan aturan baku dalam penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, komunikasi tidak sepenuhnya kaku; dalam praktiknya, berbagai jalur informal seperti grup Whatshapp, pertemuan nonformal, dan pengajian lintas pengurus menjadi saluran penting dalam mempercepat arus informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem formal tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan praktik sosial yang bersifat dinamis (Aprianto, 2017; Purnomo, 2022; Putri et al., 2024). Dalam wawancara dengan Ketua PD Muhammadiyah Deli Serdang, beliau menyatakan bahwa:

“struktur organisasi kami sangat jelas, tapi komunikasi cepat justru sering dilakukan lewat grup WA atau saat pengajian. Di situ informasi mengalir lebih cair dan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa birokrasi yang panjang” (wawancara dengan IMo4, 20 Maret 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan organisasi memanfaatkan ruang-ruang komunikasi informal. Salah satu karakteristik penting dari komunikasi internal organisasi Islam di Sumatera Utara adalah adanya kesinambungan nilai yang menjadi landasan komunikasi. Dalam Al Washliyah misalnya, setiap penyampaian keputusan organisasi selalu disertai dengan penekanan terhadap nilai keumatan dan kepatuhan kepada struktur ulama:

“kami tidak hanya menyampaikan perintah, tapi juga membawa nilai. Setiap komunikasi organisasi itu sekaligus dakwah.” (wawancara dengan IW 01, 21 Maret 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi dalam konteks organisasi Islam tidak sekadar teknis, tetapi juga ideologis dan spiritual. Saluran komunikasi formal dalam organisasi umumnya berupa surat keputusan, buletin dakwah, dan forum musyawarah berkala. Namun, dalam praktik sehari-hari, terutama dalam pengorganisasian program sosial atau aksi lapangan, komunikasi langsung dan respons cepat menjadi lebih dominan:

“Kalau mau koordinasi kegiatan bakti sosial, kami langsung hubungi pengurus lewat telepon atau WA. Nggak perlu tunggu surat. Yang penting niat dan jaringan kita jalan,” (Wawancara IM 04 tanggal 23 April 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi horizontal lebih efektif dalam konteks pelaksanaan program dibandingkan mekanisme vertikal yang bersifat administratif. Dinamika antar sub-unit dalam organisasi Islam juga memperlihatkan pola kolaboratif sekaligus kompetitif. Meskipun Al Washliyah, Muhammadiyah, dan NU memiliki misi keislaman yang sama, masing-masing memiliki gaya komunikasi dan strategi mobilisasi yang berbeda:

“kami biasa mengadakan kegiatan kolaboratif seperti tabligh akbar bersama NU atau Al Washliyah, tapi di lapangan kadang juga bersaing dalam basis massa.” (wawancara dengan IM03, 20 Maret 2025).

Interaksi ini menunjukkan bahwa organisasi Islam di Sumut berfungsi sebagai sub-sistem sosial yang saling berinteraksi dalam pola koeksistensi. Komunikasi eksternal organisasi Islam di Sumut juga menunjukkan kecenderungan terbuka, terutama terhadap pemerintah daerah dan mitra lintas sektor. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan ketiga organisasi dalam forum-forum resmi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tim penanggulangan stunting, serta pengelolaan zakat melalui Baznas daerah:

“kalau kami mau program sosial jalan, biasanya kami libatkan tokoh dari NU dan Muhammadiyah, karena jaringan mereka luas sampai ke desa” (wawancara dengan BP 09, 20 Maret 2025).

Hal ini memperlihatkan bahwa struktur komunikasi organisasi Islam menjadi simpul penting dalam relasi antar sistem kelembagaan. Keberhasilan komunikasi ini sangat bergantung pada konsistensi kepemimpinan dan rotasi pengurus. Dalam beberapa kasus, terjadi disrupsi komunikasi ketika terjadi pergantian ketua cabang atau ketua bidang yang tidak meninggalkan dokumentasi atau *briefing* yang memadai:

Kadang kami harus mulai dari nol kalau pengurus baru belum familiar dengan struktur komunikasi kami,” (wawancara dengan IW02, 20 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan lemahnya dokumentasi dan sistem arsip yang seharusnya menjadi penopang dalam komunikasi organisasi yang berkelanjutan. Selain persoalan struktural, dinamika komunikasi juga dipengaruhi oleh faktor usia dan kemampuan digital pengurus. Pengurus muda umumnya lebih terbiasa menggunakan platform digital dan aktif di media sosial, sementara generasi tua masih mengandalkan komunikasi lisan dan pertemuan fisik:

“Generasi muda kami sering membuat konten dakwah digital, tapi kadang belum sinkron dengan arah kebijakan organisasi karena kurang koordinasi” (wawancara dengan INo6, 20 Maret 2025).

Ketimpangan ini menunjukkan perlunya integrasi generasi dalam sistem komunikasi internal organisasi. Sebagai sistem sosial, komunikasi dalam organisasi Islam di Sumatera Utara juga tidak lepas dari pengaruh nilai budaya lokal. Sifat egaliter masyarakat Batak dan Melayu, serta kedekatan emosional antar anggota, menjadikan pendekatan komunikasi personal lebih efektif dibandingkan pendekatan struktural semata. Hal ini menguatkan pandangan teori sistem bahwa efektivitas komunikasi organisasi bukan hanya ditentukan oleh saluran dan pesan, tetapi juga oleh konteks kultural dan sosial tempat sistem itu beroperasi (Mansyursyah & Muktaruddin, [2025](#); Mardianty et al., [2022](#)).

Struktur dan dinamika komunikasi dalam organisasi Islam di Sumatera Utara menunjukkan pola campuran antara formalitas kelembagaan dan fleksibilitas kultural. Komunikasi internal yang kuat, diiringi dengan komunikasi eksternal yang adaptif, memungkinkan organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam menyampaikan agenda keumatan sekaligus membangun jembatan antara masyarakat dan sistem kebijakan daerah. Namun, efektivitas sistem ini tetap bergantung pada konsistensi pengelolaan informasi, integrasi generasi, serta sinergi antar lembaga yang saling melengkapi.

### **Interkoneksi Komunikasi Organisasi Islam dengan Pemerintah Daerah dalam Konstruksi Kebijakan Kesejahteraan**

Hubungan antara organisasi Islam dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara merefleksikan dinamika komunikasi antar sistem yang saling bergantung namun belum sepenuhnya terintegrasi. Organisasi Islam seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama memiliki posisi yang strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Keterlibatan mereka dalam forum-forum koordinasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Baznas, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting menjadi bukti bahwa komunikasi antar-entitas ini penting untuk menjamin keberhasilan kebijakan kesejahteraan.

Praktik komunikasi antara pemerintah dan organisasi Islam masih diwarnai oleh segmentasi kelembagaan. Setiap lembaga bekerja dalam silo masing-masing tanpa sistem komunikasi lintas sektor yang terstandarisasi. Seorang perwakilan dari PW Muhammadiyah menyampaikan bahwa:

“kami sering diajak dalam forum sosialisasi program, tapi tidak selalu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Padahal, kami punya data dan jaringan yang bisa membantu menajamkan kebijakan.” (Wawancara dengan IM-04, Tanggal 16 April 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa interkoneksi komunikasi masih bersifat formalistis dan belum bergerak ke arah kolaborasi substansial. Dalam teori sistem terbuka, keberhasilan sebuah sistem ditentukan oleh kualitas pertukaran informasi dan kemampuan merespons umpan balik secara adaptif. Dalam konteks Sumatera Utara, organisasi Islam telah membuktikan kapasitasnya dalam menjangkau kelompok rentan, mengelola zakat, dan membangun kesadaran sosial. Namun, belum ada mekanisme komunikasi terstruktur yang memungkinkan informasi lapangan dari ormas masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah secara *real-time*. Akibatnya, banyak program pemerintah yang berjalan parsial dan kurang kontekstual (Phalosa et al., [2024](#); Putri et al., [2023](#)). Kolaborasi antar organisasi Islam dan pemerintah cenderung bersifat insidental. Misalnya, dalam momentum tertentu seperti Ramadhan, peringatan hari besar Islam, atau pasca bencana, komunikasi menjadi intensif dan efektif. Tetapi di luar momen tersebut, kerja sama menjadi pasif dan tidak berkelanjutan:

“saat pandemi kami aktif bantu distribusi bantuan pemerintah, tapi setelah itu tidak ada forum lanjutan untuk evaluasi atau penyusunan kebijakan” (wawancara dengan INo5, 20 Maret 2025).

Hal ini menandakan kurangnya kesinambungan komunikasi lintas sistem. Salah satu tantangan besar adalah tidak sinkronnya sistem data antara organisasi Islam dan pemerintah. Masing-masing entitas memiliki basis data sendiri seperti mustahik, anak yatim, keluarga miskin, dan penerima bantuan, namun data ini tidak saling terkoneksi:

“Kami punya data penerima zakat di 15 kecamatan, tapi saat kami tawarkan ke dinas, mereka bilang sudah punya data sendiri,” (wawancara dengan IWo1 tanggal 20 Maret 2025).

Redundansi dan tumpang tindih data ini menyebabkan kebijakan tidak efisien dan rentan terhadap ketidaktepatan sasaran. Selain itu, ada persoalan persepsi dan posisi politik antara ormas Islam dan pemerintah daerah. Di beberapa kabupaten/kota, organisasi Islam dipandang sebagai mitra yang netral dan solutif, tetapi di tempat lain dianggap memiliki afiliasi politik tertentu yang dapat mengganggu netralitas kebijakan. Hal ini memengaruhi keterbukaan komunikasi antara kedua belah pihak:

“kadang kami bingung juga, apakah organisasi ini murni sosial atau punya agenda politik. Itu membuat kami lebih hati-hati dalam membangun kerja sama” (wawancara dengan BP10, 25 Maret 2025).

Perlu dicatat bahwa beberapa inisiatif integrasi komunikasi telah dilakukan, seperti pelibatan tokoh ormas Islam dalam Musrenbang, Forum CSR, serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Namun, pelibatan ini sering kali bersifat simbolik tanpa ruang kontribusi substansial. Dalam satu kasus di Labuhan Batu, undangan kepada organisasi Islam hanya sebatas menghadiri rapat tanpa diikutsertakan dalam tim teknis atau pelaksanaan program. Ini menegaskan bahwa komunikasi belum diarahkan pada model kolaborasi simetris (Aulia et al., [2023](#); Wahidi, [2024](#)).

Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat interkoneksi komunikasi ini. Teknologi informasi, *dashboard* data sosial, dan sistem pengaduan publik seperti Medan Dataku bisa dijadikan platform integrasi antar organisasi Islam dan lembaga pemerintah. Namun prasyaratnya adalah komitmen bersama, kepercayaan antar aktor, dan regulasi yang menjamin partisipasi ormas ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan. Jika itu terpenuhi, maka komunikasi tidak lagi menjadi hambatan, melainkan katalis pembangunan. Integrasi komunikasi antara organisasi Islam dan pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan bahasa dan nilai. Banyak kebijakan publik menggunakan istilah teknokratik yang sulit dicerna oleh masyarakat awam. Peran organisasi Islam sebagai penerjemah kebijakan ke dalam bahasa nilai seperti keadilan, amanah, dan maslahat sangat krusial:

“masyarakat lebih mudah paham kalau kami sampaikan program pemerintah lewat pendekatan agama. Itu jadi kekuatan kami dalam komunikasi kebijakan” (wawancara dengan IMo3, 26 Maret 2025).

Interkoneksi komunikasi antara organisasi Islam dan pemerintah daerah belum optimal secara sistemik, namun menunjukkan kecenderungan menuju pola kolaboratif yang lebih terbuka. Jika tantangan segmentasi data, persepsi politik, dan ketidakterikatan substansial dapat diatasi, maka komunikasi akan menjadi medium utama dalam menyatukan visi negara dan kekuatan masyarakat sipil religius untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang adil, partisipatif, dan berbasis nilai.

### **Nilai-nilai Islam sebagai Landasan Komunikasi Kebijakan Kesejahteraan**

Nilai-nilai Islam memiliki kontribusi mendasar dalam membentuk kerangka etis komunikasi organisasi Islam yang terlibat dalam perumusan dan penguatan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Utara, organisasi seperti Al Jam'iyatul Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama tidak hanya menjadi pelaku sosial, tetapi juga sumber legitimasi moral yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik serta interpretasi terhadap arah kebijakan pemerintah. Komunikasi kebijakan yang dijalankan organisasi Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai universal Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), dan *amanah* (tanggung jawab) (Cartono & Maulana, [2019](#)).

Nilai *al-'adl* atau keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam komunikasi yang ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun oleh pemerintah berpihak pada kelompok yang paling rentan. Dalam banyak kesempatan, ormas Islam menyuarakan aspirasi kaum miskin, yatim piatu, buruh, hingga penyandang disabilitas melalui khutbah, forum pengajian, hingga media keumatan:

“kami mengkritik pemerintah bukan untuk menjatuhkan, tapi agar mereka paham bahwa keadilan dalam kebijakan itu wajib hukumnya menurut Islam” (wawancara dengan IM03, 20 Maret 2025).

Nilai *maslahah* menjadi kerangka pertimbangan dalam menyampaikan pesan dakwah yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap program-program kesejahteraan. Dalam diskusi di NU Sumatera Utara, disampaikan bahwa pendekatan *maslahah* menjadi prinsip utama ketika mendampingi masyarakat memahami bantuan sosial, bansos syariah, hingga zakat produktif. Komunikasi semacam ini bersifat advokatif dan edukatif, dengan menekankan bahwa segala kebijakan publik harus memberi kemanfaatan maksimal dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas (Asriadi, [2020](#); Astuti & Wibisono, [2022](#)).

Nilai *amanah* juga menjadi pilar dalam membangun kepercayaan antara organisasi Islam dan masyarakat. Ketika ormas menyampaikan informasi kebijakan dari pemerintah, mereka menyampaikannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral:

“kalau kami ditugasi sosialisasi stunting atau zakat ke desa-desa, kami pastikan informasi itu valid dan tidak bias, karena itu bentuk amanah yang harus dijaga” (wawancara dengan IW03 tanggal 20 Maret 2025).

Nilai ini menegaskan pentingnya integritas dalam komunikasi lintas sistem antara ormas, pemerintah, dan masyarakat. Dalam kerangka teori sistem, nilai-nilai Islam tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemersatu antar sub-sistem sosial yakni organisasi Islam, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sistem komunikasi dalam teori Parsons bekerja secara interdependen, dan nilai menjadi media yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan sistem dan ekspektasi lingkungan. Ketika nilai keislaman digunakan sebagai dasar komunikasi, maka pesan-pesan kebijakan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari transformasi sosial yang bermakna (Mulia & Maharani, [2023](#); Putra, [2020](#)).

Media keumatan seperti buletin masjid, majalah dakwah, kanal Youtube ormas, dan siaran radio komunitas menjadi instrumen penting dalam mendiseminasi nilai-nilai tersebut. Di sinilah terjadi transformasi komunikasi dari sekadar pemberitahuan menjadi pengarusutamaan nilai (Aprida et al., [2024](#); Putra et al., [2019](#)). Dalam observasi penulis terhadap khutbah Jumat di beberapa masjid besar Medan, ditemukan bahwa tema kesejahteraan sering dibingkai dalam bahasa spiritual seperti “keseimbangan dunia dan akhirat”, “hak fakir miskin”, dan “keadilan sosial dalam Islam”. Ini menunjukkan bahwa komunikasi nilai mampu menjangkau dimensi afektif masyarakat.

Fatwa, tausiah, dan forum *bahtsul masail* juga menjadi alat komunikasi normatif dalam organisasi Islam. Di banyak kesempatan, forum-forum ini membahas relevansi kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* (Susanto, [2020](#)). Ketika suatu kebijakan dianggap tidak sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa, harta, atau kehormatan, maka ormas Islam akan menyampaikannya dalam bahasa yang berbasis fatwa, bukan sekadar kritik administratif. Ini

menandakan bahwa komunikasi nilai memiliki kekuatan legitimasi keagamaan yang tinggi dalam memengaruhi arah kebijakan publik (Fatmawati, [2022](#); Gunawan et al., [2022](#); Hasyim, [2016](#)).

Melalui pendekatan nilai dan komunikasi etis, organisasi Islam di Sumatera Utara mampu menjembatani bahasa teknokratik pemerintah dengan pemahaman sosial masyarakat akar rumput. Dengan menjadi penyampai pesan berbasis nilai, mereka tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga memperluas ruang dialog antara negara dan rakyat dalam bahasa yang lebih spiritual dan bermartabat. Maka, komunikasi kebijakan kesejahteraan yang berbasis Islam bukan hanya menyentuh logika kebijakan, tetapi juga menggugah nurani umat.

## SIMPULAN

Transformasi komunikasi organisasi Islam di Sumatera Utara merepresentasikan lebih dari sekadar adaptasi teknologi; ia mencerminkan integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam mekanisme komunikasi sosial dan kebijakan publik. Organisasi seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis seperti *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *amanah* (kepercayaan) mampu menjadi kekuatan penggerak dalam menghubungkan masyarakat dengan struktur pemerintahan lokal. Komunikasi berbasis nilai ini bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan ruang partisipatif di mana umat turut serta mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi dalam proses pembangunan. Dalam kerangka sistem terbuka, organisasi Islam tampil sebagai aktor strategis yang menjembatani antara negara dan masyarakat melalui bahasa moral dan tindakan kolektif yang terstruktur.

Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya penelitian lanjutan yang menggali lebih dalam praktik komunikasi organisasi Islam dalam konteks daerah lain dengan karakteristik sosio-kultural yang berbeda, serta dalam relasi yang lebih luas dengan media digital dan aktor non-pemerintah. Selain itu, studi interdisipliner yang menggabungkan perspektif komunikasi, kebijakan publik, dan kajian keislaman akan memperkaya pemahaman tentang peran strategis organisasi Islam dalam tata kelola berbasis nilai. Pemerintah daerah juga didorong untuk merumuskan regulasi komunikasi kolaboratif yang membuka ruang dialog ko-produktif dengan simpul-simpul keagamaan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada kesadaran moral kolektif masyarakat.

## REFERENSI

- Afandi, N. K. (2021). Nafs Mutmainah sebagai Dasar dalam Menciptakan Kesejahteraan Spiritual. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 169–181. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3523>
- Aprianto, N. E. K. (2017). Peran Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengembangan Organisasi Perspektif Islam. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 263–284. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp263-284>
- Aprida, O., Trinanda, R., Azis, F., Fathurrochman, I., & Nuzuar. (2024). Analisis Peran Penting Sumber Daya Manusia dalam Kepemimpinan Organisasi Pendidikan Islam. *AL-MANAR : Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 153–169. <https://doi.org/10.36668/JAL.V13i1.787>
- Asriadi, A. (2020). Komunikasi Efektif dalam Organisasi. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.358>
- Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882>
- Aulia, F., Dwianggraeni, P. R., & Ishak, A. R. (2023). Peran Organisasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal yang Efektif. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss2.art5>

- Cartono, C., & Maulana, A. (2019). Iklim Komunikasi, Iklim Organisasi dan Iklim Komunikasi Organisasi. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 228. <https://doi.org/10.24235/orasi.v10i2.5420>
- Creswell, J. (2015). *Riset pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, I. (2022). Komunikasi Organisasi dalam Hubungannya dengan Kepemimpinan dan Perilaku Kerja Organisasi. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.62825/revorma.v2i1.18>
- Gunawan, M., Hasan, F., & Mariyam, S. (2022). Pola Komunikasi Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di dalam Membangun Relasi “Connection.” *Jurnal Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 2(2), 37–46. <https://doi.org/10.33507/SELASAR.V2I2.986>
- Hasyim, N. (2016). Komunikasi Organisasi di Perguruan Tinggi Islam Negeri (Studi Kasus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 2(2), 1–36. <https://doi.org/10.52447/PROMEDIA.V2I2.540>
- Kholid, K., Sunaryo, H., & ABS, M. K. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi dan Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi Unit Aktivitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(3), 146–159. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4024>
- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time* (pp. 37–60). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Mansyursyah, M., & Muktaruddin, M. (2025). Komunikasi Organisasi BKPRMI dalam Menanggulangi Maraknya Tindakan Kriminal di Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 8(1), 119. <https://doi.org/10.22373/jp.v8i1.30655>
- Mardianty, D., Nurjannah, H., Susanti, E., & Agia, L. N. (2022). Pengaruh Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan Islam terhadap Budaya Organisasi Islam dalam Perspektif Islam pada Lingkungan Universitas Islam di Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 32(2), 162–167. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8843](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8843)
- Mu'alimin, M., Salsabilla, L. A., Jannah, S., & Amrullah, M. Z. (2024). Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 64–80. <https://doi.org/10.6132/jmpai.v2i4.372>
- Mulia, J. B., & Maharani, D. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang dalam Membangun Loyalitas Anggota. *Wardah*, 24(2), 92–104. <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.19279>
- Nashrillah, N. (2016). Perbandingan Teori Komunikasi Islam dan Barat. *Warta Dharmawangsa*, 0(48), 1829–7463. <https://doi.org/10.46576/WDW.Vol48.191>
- Nugroho, H. A., Ichsan, M., & Lukman, L. (2024). Pola Komunikasi Organisasi Majelis Talim Syubbanul Muslimin dalam Pembentukan Karakter Sosial pada Remaja. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(1), 68–75. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5602>
- Phalosa, S. A., Julistiara, H., Fadhil, A., & Hayuningasih, F. (2024). Strategi Komunikasi Organisasi UKM HTQ dalam Membentuk Karakter Islami di IAIN Cirebon. *ARKANA: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.62022/ARKANA.V3I01.6028>
- Purnomo, S. (2022). Peranan Penting Komunikasi Organisasi dalam Membangun Organisasi. *ARKANA: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(01), 34–42. <https://doi.org/10.62022/ARKANA.V1I01.2746>
- Putra, H. R. (2020). Bentuk Komunikasi Organisasi di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 68–79. <https://doi.org/10.35308/source.v5i2.1714>
- Putra, M. A., Qorib, F., & Ghofur, M. A. (2019). Pola Komunikasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V7I2.1428>
- Putri, C. A., Berlianie, V., & Mubarak, I. (2024). Pengaruh Nilai Nilai Agama Islam dalam Membentuk Strategi Komunikasi Organisasi Keagamaan. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(1), 32–41.
- Putri, T. I., Hayati, S. M. N., Shidiq, E., & Zainab, D. (2023). Komunikasi Dakwah Kultural: Studi Kasus Komunikasi Organisasi Fatayat Nahdatul Ulama (NU). *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 599–608. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i1.6565>

- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Saleh, M. (2024). Etika Komunikasi Islami: Solusi untuk Kesuksesan Organisasi. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 14(1), 27–46. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i1.2756>
- Susanto, J. (2020). Etika Komunikasi Islami. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.51590/waraqat.viii.28>
- Wahidi, A. (2024). Strategi Komunikasi Organisasi dalam Menanggulangi Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Jember. *Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.35719/maddah.v3i1.34>
- Yadi, A. (2020). Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia. *Kalijaga Journal of Communication*, 2(1), 47–60. <https://doi.org/10.14421/kjc.21.04.2020>
- Yani, L. A., Razkia, D., & Niko, P. F. (2022). Kemampuan Komunikasi Organisasi terhadap Komitmen Organisasi pada Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 13(1), 22–33. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v13i1.14072>
- Zulvianti, N., Sari, G. I., & Kohar, W. (2021). Bentuk Pesan Komunikasi Organisasi Ikatan Pemuda dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Warga Kota Padang. *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 12(02), 181–191. <https://doi.org/10.15548/AMJ-KPI.V12I02.3502>

### Daftar Informan

- 1) IW-01, 52 tahun, Ketua Bidang Dakwah, PW Al Jam'iyatul Washliyah (12 Februari 2025).
- 2) IW-02, 47 tahun, Sekretaris Wilayah, PW Al Jam'iyatul Washliyah (12 Februari 2025).
- 3) IM-03, 55 tahun, Ketua Wilayah, PW Muhammadiyah (13 Februari 2025).
- 4) IM-04, 50 tahun, Ketua Daerah, PD Muhammadiyah Deli Serdang (13 Februari 2025).
- 5) IN-05, 56 tahun, Ketua Wilayah, PW Nahdlatul Ulama (14 Februari 2025).
- 6) IN-06, 43 tahun, Ketua Lembaga Sosial, PC NU Labuhan Batu Utara (14 Februari 2025).
- 7) DS-07, 51 tahun, Kepala Bidang Kesejahteraan, Dinas Sosial Sumatera Utara (15 Februari 2025).
- 8) DS-08, 48 tahun, Kepala Seksi Sosial Keagamaan, Dinas Sosial Sumatera Utara (15 Februari 2025).
- 9) BP-09, 49 tahun, Kepala Sub bidang Sosial, Bappeda Provinsi Sumatera Utara (16 Februari 2025).
- 10) BP-10, 44 tahun, Perencana Madya, Bappeda Provinsi Sumatera Utara (16 Februari 2025).
- 11) TM-11, 60 tahun, Ulama dan Tokoh Adat, Forum Komunikasi Umat (17 Februari 2025).
- 12) TM-12, 33 tahun, Aktivistis Keagamaan Muda, Forum Komunikasi Umat (17 Februari 2025).